

ruang pada Satuan Ruang Strategis.

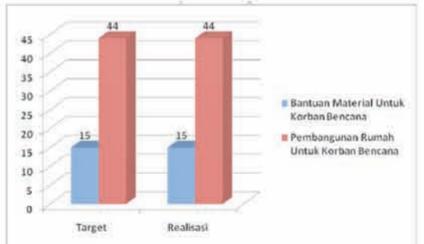
- Usuran Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak didukung oleh Program Penyelenggaraan Perumahan dan Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2019 dengan jumlah 10.555 unit melalui berbagai sumber pendanaan yaitu anggaran DAK, BPS, APBD kabupaten/kota, dan APBD Provinsi. Pada tahun 2019 target hunian yang layak adalah 95,49%. Dengan demikian Penanganan RTLH mulai Tahun 2017-2019 berjumlah 25.486 unit, dapat memenuhi target persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak pada tahun 2019 yaitu 96,66%.

Tabel 0 1 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019

LOKASI	DATABANK KAB	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	PENANGANAN RTLH 2019						SH TER TANGANI TH 2019
				DAK	BPS	KAB/KOTA	CSR	PROF	0	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	178	150	208	0	16	552	
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	162	748	350	0	1.140	2.400	
Kab. Bantul	5.701	2.101	1.848	178	1.515	133	0	515	2.360	
Kab. Sleman	16.347	1.861	1.447	170	600	600	0	760	2.180	
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.194	0	1.137	134	0	1.841	3.112	
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	668	4.150	1.425	0	4.292	10.555	

Pelaksanaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana berdasarkan realisasi yang sudah dilaksanakan oleh BPBD DIY dengan rincian sebagai berikut.

Gambar Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2019



- Usuran Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan tercapai sebesar 104,38%, yaitu dari 320 desa/kelurahan yang ditargetkan, dan yang sudah terealisasi sebesar 334 desa/kelurahan. Jenis upaya warga menjaga keamanan lingkungan yaitu:

- Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Kamling se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 392 Pos yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 69 Pos, Kabupaten Bantul berjumlah 69 Pos, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 132 Pos, Kabupaten Sleman berjumlah 83 Pos dan Kota Yogyakarta berjumlah 39 Pos
- Pembentukan Regu Keamanan se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 347 regu yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 56 regu, Kabupaten Bantul berjumlah 60 regu, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 113 regu, Kabupaten Sleman berjumlah 81 regu dan Kota Yogyakarta berjumlah 37 regu
- Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 222 Anggota yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 28 anggota, Kabupaten Bantul berjumlah 47 anggota, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 61 anggota, Kabupaten Sleman berjumlah 64 anggota dan Kota Yogyakarta berjumlah 22 anggota
- Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 376 tamu yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 69 tamu, Kabupaten Bantul berjumlah 71 tamu, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 111 tamu, Kabupaten Sleman berjumlah 81 tamu dan Kota Yogyakarta berjumlah 44 tamu

- Kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor, kebakaran permukiman dan angin kencang. Kebakaran permukiman paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul dengan persentase 41,51% dari seluruh jumlah kejadian kebakaran permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sejumlah 225 dari 542 jumlah kejadian. Untuk kejadian longsor tahun 2019, Kabupaten Bantul juga menempati posisi tertinggi dengan 220 kejadian atau 43,48% dari total 506 kejadian tanah longsor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kejadian angin kencang di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2019 cenderung merata dengan peringkat tertinggi di Kabupaten Sleman dengan 85 kejadian atau 50,59% dari total 168 kejadian yang termasuk kategori bencana.

- Langkah-langkah prioritas BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir risiko dengan meningkatkan ketahanan daerah adalah sebagai berikut:
 - Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui Destana/Katana dan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
 - Penguatan sistem peringatan dini baik yang berbasis masyarakat maupun teknologi pada wilayah rawan bencana melalui pembangunan dan pengembangan EWS/ Sistem Peringatan Dini terintegrasi
 - Penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan melalui pengembangan pemanfaatan TI
 - Menyusun kajian-kajian kebencanaan untuk pengurangan risiko
 - Memberdayakan forum/jaringan/kemitraan antar-lembaga untuk pengurangan risiko bencana terutama melalui FPRB dan klaster-klaster PB
 - Pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman (build back better and safer) berbasis pengurangan risiko bencana

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya tersebut menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Usuran Sosial
 - Penyelenggaraan Urusan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2019, digambarkan melalui indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai berikut:
 - PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 40,97% dengan realisasi sebesar 42,17% dengan persentase capaian target 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 95,24%
 - Indikator Persentase PPKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal, kepelawaran dan kesetiakawanan sosial: Target 2019 sebesar 51,57% dengan realisasi sebesar 51,72%. Capaian target 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 100,08%.

- Usuran Tenaga Kerja
 - Capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2019 ini sangat baik yaitu sebesar 106,19%. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 1050 orang dengan realisasi hingga 2019 sebesar 1115 orang. Apabila capaian 2019 dibandingkan target akhir tahun pada RPJMD yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar 42,47%. Indikator ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,33% (capaian tahun 2018 sebesar 102,86%). Capaian hingga tahun 2019 sebanyak 1115 orang dengan rincian penempatan pada tahun 2018 sebanyak 539 orang bertambah 576 penempatan pada tahun 2019. Keberhasilan untuk mewujudkan indikator ini adalah pelaksanaan pelatihan yang telah memenuhi standar kompetensi serta pemanfaatan Kios 3 in 1 untuk penempatan lulusan pelatihan.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2019 ini sebesar 110,00% sehingga sangat baik. Indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 10 % (capaian tahun 2018 100%). Berdasarkan dokumen RPJMD TA 2017-2022, indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20 kasus dan terealisasi sebesar 22 kasus sehingga capaian realisasinya

sebesar 110,00%. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh peran mediator hubungan industrial untuk menyelesaikan semua kasus yang didaftarkan serta keberhasilan Tim Deteksi Dini dalam mendampingi perusahaan menjalankan hubungan industrial dengan baik.

- Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Sasaran Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran ini, maka diperlukan adanya strategi-strategi dan arah kebijakan yang terarah, strategi yang dilakukan antara lain dengan:
 - Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah public melalui advokasi dan penguatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih perempuan.
 - Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
 - Meningkatkan level capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA di provinsi dan kabupaten/kota.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan yang ada seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2AKK)

- Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:
- Adanya Pelayanan Kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jejaring dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)
 - Adanya Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota
 - Adanya Telepon Sahabat Anak (TeSa 129) yang dikemban menjadi Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa)
 - Dilaksanakannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak
 - Banyaknya lembaga yang menangani (Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)
 - Adanya Sistem kerja berjenjang yang sudah berjalan sangat baik (Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan).
 - Payung hukum cukup lengkap (Perda No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan).

- Usuran Pangan
 - Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2019 sebesar 95,50. Capaian dihitung menggunakan data dari tabel konsumsi hasil SUSENAS BPS tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Realisasi pada tahun 2019 ini mencapai 105,85% dibanding target tahunan. Ketercapaian dibanding target akhir RPJMD DIY tahun 2022 sebesar 91,12 telah tercapai sebesar 104,81%. Hasil ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 89,92. Capaian ini sudah melebihi capaian Nasional sebesar 91,3. Namun masih perlu peningkatan pola konsumsi masyarakat di beberapa golongan pangan yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan karena capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan.

Gambar Grafik Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Standar dan Capaian Skor PPH DIY tahun 2019



Sumber: Data BPS diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang, dan Aman (BZSA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah BZSA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya BZSA terus digalakkan dan disebarkan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi BZSA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

- Usuran Pertanahan
 - Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY. Disamping juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang terbiayanya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menyalahter Serat Kekancangan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pada saat ini Tanah Kasultanan dan Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

- Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan Urusan Pertanahan untuk memfasilitasi:
 - Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
 - Memfasilitasi pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Capaian Kinerja Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun 2019 telah melampaui target. Dari target 9.419 bidang yang sudah terealisasi adalah 10.729 bidang atau mencapai 113,91%. Perhitungan bahwa jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 10.729 bidang dari total jumlah bidang 13.877 bidang. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2019 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 4.944 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.600 bidang. Berikut ini disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun 2019 tiap kabupaten/kota:

Tabel Target dan Realisasi IKA, IKU, IKTL dan IKLH 2018-2019

Indikator Sasaran	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	34,20	40,25	36,49	38,65
IKU	87,06	84,24	87,73	85,25
IKTL	55,50	60,86	58,18	59,70
IKLH	58,58	61,69	60,52	61,05

Sumber: BLH DIY, 2019 (diolah)

- Usuran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Jumlah penduduk wajib KTP di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Desember 2019 berdasarkan database

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kabupaten/kota adalah 2.790.485 orang. Dari jumlah tersebut, 99,69% atau sebanyak 2.781.908 telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di database KTP-el. Bila diolah per kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el, yaitu 99,96%, diikuti Kabupaten Bantul 99,83%, Kabupaten Sleman 99,68%, Kota Yogyakarta 99,66% terendah Kabupaten Kulon Progo 98,98%.

Walaupun angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melampaui target RPJMD, masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 8.577 orang atau 0,31% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Pencapaian Daerah Istimewa Yogyakarta atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2019 tercatat 94,76%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, antara lain konversi database kelahiran non-SIAK ke database SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

- Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dari hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 diketahui bahwa Desa dengan status Mandiri sebanyak 49 (empat puluh sembilan) desa, status Maju sebanyak 204 (dua ratus empat) desa dan status berkembang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) desa (sumber data : agregat dari Kabupaten/Kota dan dapat diakses melalui web http://IDM.kemendesa.go.id). Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengentaskan desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal meningkat menjadi desa Berkembang.

Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemda DIY adalah dengan meningkatkan pembinaan Desa/Kelurahan melalui evaluasi perkembangan desa/kelurahan. Evaluasi ini merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, kondisi desa/kelurahan cepat berkembang sampai dengan tahun 2019 adalah 42 desa/kelurahan. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 6 desa/kelurahan dari tahun 2018 dan memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebesar 100 persen.

Grafik Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

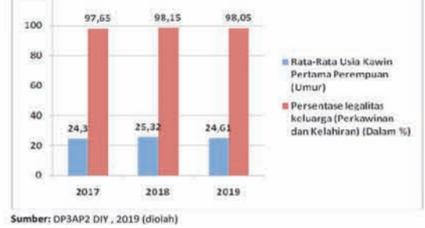


Sumber: Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2019 (Diolah)

- TP-PKK DIY merupakan salah satu lembaga yang menjadi penggerak tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY selama Tahun Anggaran 2019 adalah kegiatan:
 - Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)
 - Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)-Kesehatan
 - Mengikuti Pelaksanaan Jambore Nasional Kader PKK
 - Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam Rangka Bulan Bakti Golong Royong Masyarakat (BBGRM)
 - Lomba Pengeloa Terbaik PKK-KKBPK-Kesehatan Tingkat DIY
 - Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat DIY
 - Pelatihan Penataan Arsip Tingkat DIY

- Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
 - Sasaran Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dan meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Untuk sasaran pertama meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan menggunakan indikator umur menikah pertama perempuan sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia menggunakan indikator Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran) pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019



Sumber: DP3AP2 DIY, 2019 (diolah)

- Usuran Perhubungan
 - Pada tahun 2019 capaian indikator program peningkatan terbit perizinan angkutan tidak dalam trayek telah mencapai 147% dari target 76%. Untuk mencapai indikator program penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian dihitung dengan cara menghitung jumlah tahapan yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian kali 100%. Pada tahun 2019 capaian indikator program penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian telah mencapai 50% dari target 40%.

Program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas didukung dengan 2 (dua) indikator program, yakni (1) Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas pada kawasan prioritas, (2) Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta. Pada tahun 2019 capaian indikator program penerapan manajemen rekayasa lalu lintas pada kawasan prioritas telah mencapai 48% dari target 48%. Pada tahun 2019 capaian peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta telah mencapai 53% dari target 60%.

- Usuran Komunikasi dan Informatika
 - Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan 6 urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui Integrated Development Management Center (IDMC) (idmc.jogjapro.go.id), yakni urusan Sosial, urusan Keamanan dan Ketertiban Umum, urusan Tata Ruang dan Pertanahan, urusan Kominfo, urusan Perhubungan dan urusan kependudukan. Melalui sistem informasi yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Didalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi surveillance yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY. Untuk lebih memudahkan dalam komunikasi berjalan dengan baik dan lancar pada tahun 2019 dilakukan pengadaan 1 (satu) unit aplikasi server video konferensi dan 15 (lima belas) unit aplikasi client video konferensi yang dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menyediakan 76 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro sebanyak

21 titik dan di lokasi wisata tebing Breksi sebanyak 4 titik. Pada Tahun 2019 Pemda DIY memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.



Gambar: Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat pada Tahun 2019

- Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Perkembangan koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2015-2019

No	Urutan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif	2.369	2.427	1.782	1.926	1.722
2	Koperasi tidak Aktif	316	311	598	63	196
3	Modal Sendiri (Rp/uta)	1.318.800	1.139.942	1.200.158	1.425.918	1.625.568
4	Modal Luar (Rp/uta)	2.320.866	1.835.173	2.085.166	2.262.263	2.512.343
5	Volume Usaha (Rp/uta)	3.599.547	4.473.800	3.678.342	4.394.362	4.325.218
6	Koperasi Primer	2654	2707	2352	1963	1.890
7	Koperasi Sekunder	31	31	28	26	28

Sumber: Online Data System, Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2019

Salah satu upaya pembinaan UMKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, disamping itu dengan sentra akan banyak melibatkan UMKM. Dengan pembinaan berbasis sentra ini akan meningkatkan jumlah UMKM secara signifikan, seperti data pada Tabel 3-74.

Tabel Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2015 - 2019

No	Skala Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	125.863	130.525	135.799	141.991	143.385
2	Usaha Kecil	57.412	59.655	62.042	64.896	65.533
3	Usaha Menengah	34.737	36.031	37.472	39.196	39.581
4	Usaha Besar	11.962	12.408	12.904	13.498	13.631
	Jumlah	230.047	238.619	248.217	259.581	262.130

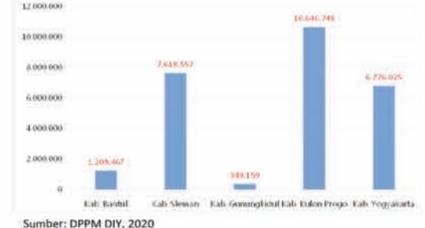
Sumber: Dataku Bappeda DIY tahun 2019

- Usuran Penanaman Modal
 - Dari tabel dan grafik di bawah akan terlihat bahwa antara wilayah dengan nilai realisasi investasi tertinggi (Kabupaten Kulon Progo) dan terendah (Kabupaten Gunungkidul) masih terdapat kesenjangan cukup besar (sekitar Rp. 10.291.589.000.000). Hal ini menunjukkan masih belum terdapatnya pemerataan pertumbuhan investasi di kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada grafik Perkembangan Investasi Per Kabupaten/Kota kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 berikut:

Tabel Nilai Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Hingga Tahun 2019 Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)

No	Kab/Kota	Tambah Investasi		
		PMDN	PMA	PMDN + PMA
1	KAB. BANTUL	110.794.300.000	20.085.000.000	130.879.300.000
2	KAB. GUNUNGKIDUL	50.877.200.000	27.531.000.000	78.408.200.000
3	KAB. KULON PROGO	4.854.785.900.000	14.098.500.000	4.868.884.400.000
4	KAB. SLEMAN	795.214.800.000	107.178.000.000	902.392.800.000
5	KOTA YOGYAKARTA	487.166.500.000	50.554.500.000	537.721.000.000

Grafik Realisasi Investasi Hingga Tahun 2019 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Juta)



Sumber: DPPM DIY, 2020

- Usuran Kepemudaan dan Olahraga
 - Di bidang keolahragaan, pencapaian prestasi olahraga pelajar DIY masih menjadi fokus utama Pemerintah Daerah DIY. Guna mendukung pencapaian prestasi ini diselenggarakan seleksi, pembinaan terhadap calon atlet serta calon pelatih atlet, dan penyempurnaan fasilitas-fasilitas olahraga agar lebih memadai. Pembinaan keolahragaan yang dilakukan di DIY pada tahun 2019 antara lain persiapan pengiriman kontingen ke penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POP NAS), Pembinaan Atlet Berkahat (PAB), serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Paralimpih Pelajar Daerah (PEPARPEDA). Penyelenggaraan POPDA dimaksudkan sebagai sarana guna menghadapi POPWIL tahun 2021.

Pada indikator capaian prestasi olahraga, DIY berhasil meraih peringkat 7 dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar di Jakarta tanggal 16 s.d. 25 November 2019. Pada tahun 2019, DIY mengikutsertakan 122 atlet dari 13 cabang olahraga. Dalam ajang ini, kontingen DIY berhasil meraih 17 medali yang terdiri dari 8 medali emas (di cabang taekwon do, atletik, panahan, voli pasir), 4 perak (di cabang taekwon do, pencak silat, dan panahan), serta 5 perunggu (di cabang tarung derajat, taekwon do, pencak silat, dan panahan). Secara keseluruhan jumlah medali yang diperoleh DIY selama tahun 2019 dari berbagai kompetisi nasional maupun internasional adalah sebanyak 71 buah dengan rincian 39 emas, 20 perak, dan 12 perunggu.

Gambar Perolehan Medali Yang Diperoleh DIY Selama Tahun 2019